

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengantisipasi era globalisasi dengan ciri utama persaingan yang makin ketat dan saling ketergantungan semakin kuat, telah dilakukan berbagai cara. Salah satu cara yang dianggap paling strategis ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dan maju akan dapat menghadapi permasalahan masa depan dengan pendekatan yang tepat dan langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Upaya tersebut telah lama digariskan dalam UUD 1945 sebagai salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Realisasi cita-cita tersebut dijabarkan ke dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang dijadikan legalitas sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional di sini memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas kemampuan dan martabat bangsa. Sasaran utamanya jelas difokuskan pada pengembangan kemampuan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara mandiri, berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di sektor pendidikan ini, telah dituangkan dalam GBHN (1993) yang difokuskan pada empat strategi pokok yaitu: (1) pemerataan kesempatan, (2) relevansi, (3) kualitas, dan (4) efisiensi.

Dengan tidak mengesampingkan arti strategi lain, strategi kualitas yang juga melekat aspek relevansi selalu mendapat sorotan dalam berbagai diskusi ilmiah, rapat birokrat dan pengusaha, bahkan aspek kualitas ini sering kali ditempatkan sebagai indikasi

penentu keberhasilan pendidikan. Memang diakui, implikasi dari era globalisasi yang menghandalkan manusia yang berkualitas sebagai tenaga ahli dalam berbagai bidang merupakan tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan. Kita harus mampu mendiagnosa dan mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan mutu pendidikan tersebut, termasuk persoalan mutu pendidikan dasar, baik pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri maupun Sekolah Dasar Swasta. Salah satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan mutu hasil pendidikan adalah kualitas guru.

Pernyataan di atas merupakan salah satu barometer untuk mewujudkan sasaran-sasaran PJP II (GBHN 1993) yang ditandai dengan terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselamatan dan selaras, dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum pembinaan kualitas manusia, khususnya peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan, dijelaskan dalam PP No 38 Tahun 1992. Pada peraturan tersebut dengan tegas bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Jika dilihat lebih jauh, maka pembinaan itu adalah serangkaian upaya meningkatkan kemampuan penguasaan aspek teoritis serta kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas sehingga kualitas diri, kualitas lulusan dan kualitas Sekolah mengalami perubahan dinamis.

Akan tetapi jika dilihat secara makro, telah terjadi berbagai perubahan dalam tatanan pembinaan kualitas tenaga kependidikan, akhirnya pemerintah pusat berada pada suatu kesimpulan bahwa kebijakan pengelolaan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang paling strategis, diserahkan kepada pemerintah daerah, jelas di sana terdapat pembinaan kemampuan profesional guru. Di dalam PP No. 8/1995, terlihat jelas bahwa batas-batas pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai percontohan otonomi. Terutama menyangkut pengelolaan Sekolah Dasar dalam hal: (1) *man*, (2) *money*, dan (3) *meteril*. Kenyataan pelimpahan tugas dan wewenang yang mendapat sorotan serius baru mengenai pembinaan kemampuan profesional guru Sekolah Dasar Negeri (SDN), sedangkan pembinaan kemampuan profesional guru Sekolah Dasar Swasta (SDS) masih mengalami ganjalan-ganjalan tertentu dalam implementasinya.

Menurut Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud (1994), pembinaan kualitas kemampuan guru dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pembinaan langsung dari atasan dan pembinaan dari luar sekolah. Pembinaan atasan langsung merupakan suatu strategi mendasar yang harus dilakukan secara simultan dan terencana. Dikatakan demikian karena kadar kualitas kemampuan yang ditandai dengan kualitas kinerja akan selalu mengalami berbagai perubahan. Guna mewujudkan perubahan dinamis proses pembinaan harus diarahkan kepada keselarasan tuntutan pendidikan dan pengajaran selaras dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tuntutan pendidikan dan pengajaran diarahkan pada upaya mengelola dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara optimal. Pembinaan itu meliputi aspek kemampuan

menyusun perencanaan mengajar, pengembangan kegiatan belajar mengajar yang menantang, pengelolaan hasil kerja siswa, dan penilaian kegiatan belajar. Sedangkan tuntutan zaman diarahkan pada pembinaan pemenuhan kebutuhan politik, sosial, budaya dan perekonomian. Secara operasional dilakukan melalui suatu jaringan dan sistem pembinaan kreatif yang melibatkan seluruh unsur pembina guru dalam suatu kegiatan yang terpadu, seperti Kepala Sekolah. Pengawas, pembina lain, dan pihak-pihak yang terkait seperti LPTK dan organisasi Profesi Kependidikan.

Operasionalisasi pembinaan kemampuan guru Sekolah Dasar yang dituangkan dalam PP No. 28/1990 menyatakan dengan lugas bahwa "Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan guru dan tenaga kependidikan dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana". Pernyataan ini menggambarkan bahwa tugas pembinaan kemampuan guru menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah. Oleh karena itu Kepala Sekolah perlu memikirkan suatu program pembinaan kemampuan guru dengan melibatkan semua unsur terkait, dan dikordinasikan/dipadukan dengan program pembinaan kemampuan yang dilakukan Pengawas, sehingga tidak saling tumpang tindih, melainkan satu kesatuan yang mengandung prinsip saling menunjang dan saling melengkapi. Fokus pembinaan kemampuan profesional ditujukan pada upaya bagaimana merealisasikan penyusunan program kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan dan pengajaran para guru Sekolah Dasar.

Kenyataan menunjukkan bahwa pembinaan kemampuan profesional yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas secara umum telah berjalan sesuai harapan. Akan tetapi, kalimat-kalimat sumbang masih disuarakan oleh sebagian masyarakat yang menyebutkan "kemampuan guru Sekolah Dasar belum profesional".

Benarkah demikian? Sebenarnya harus diakui kebenarannya, sebab masih banyak substansi berkaitan dengan kerja para guru Sekolah Dasar, terutama pada Sekolah Dasar Swasta yang memiliki kelemahan tertentu. Oleh karena itu pembinaan kemampuan guru Sekolah Dasar Swasta yang masih harus mendapat pembinaan yang serius.

Di Propinsi Riau, pembinaan guru Sekolah Dasar dilaksanakan berdasarkan UU No. 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, sebagai realisasi PP No. 65 Tahun 1951. Dengan ini terbentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. UP. 202/5.D/58, tanggal 20 Agustus 1958, dan diikuti pembentukannya di Daerah Tingkat II yang ada. Secara operasional tugas pembinaan itu dilakukan sesuai dengan lokasi dan jenis sekolah yang dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama pembinaan guru SD Terpencil/Sulit. Kedua, pembinaan guru SD Negeri (biasa), dan ketiga pembinaan guru SD Swasta. Secara keseluruhan, pembinaan itu ditujukan kepada sejumlah 25.493 orang guru Sekolah Dasar. Menurut data statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, keadaan kualifikasi tingkat pendidikan guru tahun 1996/1997 yakni, 1.039 orang dari SGB/KGB, 17.524 orang tamatan SPG/KPG/PGA dan SGO. 174 orang lulusan D-III, 610 orang tamatan S-1, serta 8 orang yang telah menyelesaikan studi di Program Magister. Dari jumlah guru tersebut terdapat guru Sekolah Dasar Swasta, yakni guru yang berstatus pegawai negeri diperbantukan di SD Swasta.

Kondisi guru Sekolah Dasar di atas menggambarkan, bahwa secara teoritis mereka telah memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup bervariasi.

Standar/kualifikasi kemampuan menurut sertifikasi, ada yang di bawah ketentuan Depdikbud (D-II) dan ada pula yang telah melebihi. Hal ini dapat dimengerti bahwa komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sangat tinggi dalam mengantisipasi perkembangan tuntutan zaman, terutama dalam rangka mengoptimalkan keuntungan melalui kerjasama SIJORI. Sungguhpun demikian titik-titik kelemahan masih terlihat di sana sini, terutama setelah dipantau dari kinerja yang ditampilkan para guru di lapangan, dan kondisi ini sudah merata di setiap daerah.

Berbagai informasi menunjukkan, antara lain, bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Pendidikan Dasar (1995) dengan alokasi Propinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, terungkap bahwa rendahnya kualitas kinerja guru justru disebabkan pembinaan oleh Kepala Sekolah belum dilakukan secara baik. Sebelumnya penelitian ini mengasumsikan bahwa proses pembinaan yang efektif justru dilakukan oleh atasan secara langsung. Lain halnya, dalam penelitian Teti Heriati (1994) diungkapkan bahwa kemampuan profesional dosen junior akan lebih efektif bila dibina oleh dosen senior. Kasmianto (1997) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembinaan kemampuan dan pengembangan pribadi guru HONDA (Honorer Daerah) dapat dilakukan melalui motivasi atasan dan pemberian tugas belajar di berbagai perguruan tinggi dalam suatu program yang terencana.

Kesimpulan umum yang dapat dipetik dari berbagai informasi di atas dapat dinyatakan bahwa pembinaan kemampuan profesional guru sangat penting, dan harus dijadikan agenda khusus, selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan secara individual, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas Sekolah

Salah satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan mutu hasil pendidikan adalah kualitas guru. Guru Sekolah Dasar yang berkualitas tentu bukan hanya mampu menguasai materi pengajaran, akan tetapi harus mampu meningkatkan kualitas siswa agar mampu memacu prestasi dalam rangka memenangkan persaingan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Penilaian kualitas guru Sekolah Dasar bukan lagi berdasarkan kepada apa yang diketahuinya (*know-what*), melainkan apa yang secara nyata dapat ditampilkan (*know-how*). Begitu juga sebagian masyarakat cenderung lebih melihat apa yang dapat dilakukan seorang guru (*what one can do*). Untuk memenuhi kriteria tersebut, karena itu perlu dilakukan pembinaan terhadap kemampuan secara terus menerus menuju tingkatan yang profesional secara optimal.

Di samping menyadari kebenaran pandangan sebagian masyarakat yang mengungkapkan tentang rendahnya kemampuan guru pada Sekolah Dasar Swasta tertentu, juga ditemukan fenomena pembinaan kemampuan profesional yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD yang masih harus ditingkatkan keefektifannya. Dengan berbekal surat izin prasurvey dari Program Pasca Sarjana IKIP Bandung No. 1028/K04.7/ PL.06.05/1997 tanggal 24 Nopember 1997 peneliti melaksanakan prasurvey lapangan. Dari hasil pelaksanaan prasurvey yang dilakukan di beberapa Sekolah Dasar Swasta dalam Kotamadya Pekanbaru dapat diperoleh dasar-dasar dan kondisi pembinaan kemampuan profesional guru Sekolah Dasar Swasta yang belum optimal antara lain :

- (1) Persepsi sebagian Kepala SD Swasta yang menganggap guru semata-mata hanya sebagai bawahan, sehingga proses pembinaan mengutamakan pendekatan otoriter. Sebenarnya guru adalah mitra kerja yang secara bersama memiliki

komitmen untuk mencapai tujuan institusional. Pembinaan dalam konteks ini justru memerlukan pendekatan persuasif edukatif;

- (2) Kepala SD Swasta belum mampu menyusun program pembinaan yang baik, terutama program pembinaan kemampuan yang memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan mendesak dari kalangan guru;
- (3) Masih adanya kesukaran yang dihadapi Kepala SD Swasta dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna merealisasikan program pembinaan kemampuan profesional guru yang optimal;
- (4) Masih terdapat *"mismatch"* antara kebutuhan pembinaan kemampuan profesional guru SD Swasta yang dituangkan dalam program kerja Kepala Sekolah dengan kebutuhan pembinaan Pengawas;
- (5) Frekwensi pelaksanaan pembinaan kemampuan profesional yang dilakukan Pengawas sangat terbatas, dan selalu dalam bentuk pertemuan kelompok. Kondisi ini kurang memungkinkan adanya pembinaan kemampuan memecahkan permasalahan yang dirasakan guru yang umumnya beraneka ragam;

Melihat fenomena di atas, akar permasalahan itu bukan hanya pada guru sebagai pribadi, akan tetapi justru pada upaya pembinaan yang dilakukan belum menekankan pada kesamaan visi, misi dan tujuan dari unsur-unsur terkait. Akan tetapi harus diakui pula bahwa tidak semua SD Swasta yang kurang baik dalam pembinaan kemampuan personilnya. Oleh karena itu, permasalahan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian, karena di samping sesuai dengan materi Program Studi Administrasi Pendidikan, hasil penelitian juga direkomendasikan sebagai solusi dalam mewujudkan proses pembinaan kemampuan profesional guru di lingkungan Sekolah Dasar Swasta yang optimal pada masa yang akan datang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi Pengelola SD Swasta dalam mengaplikasikan



program pembinaan kemampuan profesional yang terbatas akibat praktek kebijakan tertentu, ataupun status quo pelaku pendidikan setempat.

## B. Permasalahan

Secara umum penelitian difokuskan kepada masalah pokok yang dirumuskan: "Bagaimana Upaya Pembinaan Kemampuan Profesional Guru yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta dan Pengawas TK/SD di Kotamadya Pekanbaru?" Untuk menjawab permasalahan tersebut secara operasional diajukan rincian pertanyaan penelitian dengan pengelompokan sebagai berikut:

- (1) Pembinaan oleh Kepala Sekolah.
  - (a) Bagaimana persepsi Kepala SD Swasta tentang tugasnya sebagai pembina kemampuan profesional guru di sekolah?
  - (b) Jenis pembinaan yang bagaimana dilakukan oleh Kepala SD Swasta guna meningkatkan kemampuan profesional guru di sekolah?
  - (c) Bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan Kepala SD Swasta dalam membina kemampuan profesional guru di sekolah?
  - (d) Bagaimana kesesuaian antara pembinaan yang dilakukan selama ini dengan tuntutan kurikulum ?
- (2) Pembinaan kemampuan profesional oleh Pengawas TK/SD :
  - (a) Bagaimana persepsi Pengawas TK/SD tentang tugasnya sebagai pembina kemampuan guru?
  - (b) Jenis pembinaan apa saja yang dilakukan selama ini?
  - (c) Bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan Pengawas TK/SD dalam pembinaan tersebut?

- (d) Bagaimana kesesuaian antara pembinaan yang dilakukan selama ini dengan tuntutan kurikulum?
- (3) Gambaran pertumbuhan kemampuan profesional dan kinerja guru SD Swasta.
- (a) Bagaimana pertumbuhan kemampuan profesional guru setelah dibina oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD tersebut?
- (b) Bagaimana pula kualitas kinerja para guru yang telah dibina oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD setempat?
- (4) SWOT (KKPA) Pembinaan Profesional Guru SD Swasta.
- (a) Kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD dalam melaksanakan pembinaan profesional guru SD Swasta?
- (b) Kelemahan-kelemahan apakah yang ada dalam pembinaan kemampuan profesional guru SD Swasta?
- (c) Peluang apa yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD dalam melakukan pembinaan profesional guru SD Swasta?
- (d) Ancaman atau hambatan apa yang dirasakan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD dalam melaksanakan pembinaan profesional guru SD Swasta?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan Penelitian.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses dan hasil Pembinaan Kemampuan Profesional guru yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta dan Pengawas TK/SD di Kotamadya

Pekanbaru Propinsi Riau. Disamping itu, juga untuk mengenal dan memahami masalah-masalah yang dihadapi dalam membina kemampuan profesional guru dan upaya pemecahannya.

Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah menjawab problematik yang diajukan sebelumnya dengan mengungkapkan, mendeskripsikan serta mengevaluasi hal-hal dibawah ini.

1. Pembinaan kemampuan profesional guru oleh Kepala Sekolah Swasta.
2. Pembinaan kemampuan profesional guru oleh Pengawas TK/SD.
3. Gambaran pertumbuhan kemampuan profesional dan kinerja guru SD Swasta.
4. SWOT (KKPA) Pembinaan kemampuan profesional guru SD Swasta.

## **2. Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan dari studi ini dapat dijadikan bahan masukan pembinaan kemampuan profesional guru selanjutnya dan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan wawasan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu hasil studi ini akan bermanfaat bagi pihak tertentu yang terlibat dalam pembinaan pendidikan. Manfaat langsung dari hasil penelitian ini ditujukan kepada:

### **1. Pengawas dan Kepala SD Swasta**

Informasi empiris tentang pembinaan kemampuan profesional guru dapat diungkapkan melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Keunggulan dan kelemahan dalam praktek pembinaan selama ini, yang diungkapkan melalui penelitian ini

merupakan bahan introspeksi untuk pembinaan kemampuan profesional guru SD Swasta selanjutnya. Pada gilirannya diharapkan akan mampu membenahi pembuatan program pembinaan selanjutnya mampu memperbaiki kualitas kinerja dalam pengajaran dan tuntutan perkembangan pendidikan dasar secara makro dalam rangka mewujudkan implementasi kerja sama yang menguntungkan dalam program regional SIJORI (Singapura, Johor dan Riau).

## 2. Guru

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru sebagai tenaga pengajar, agar mereka mengetahui posisi masing-masing sebagai orang terpenting dan berada dalam posisi terdepan guna menghadapi tuntutan kualitas lulusan para siswanya. Informasi tentang kelemahan dan keunggulan yang ditampilkan guru dalam kinerja pengajaran dapat menjadi landasan bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru di masa datang.

## 3. Peneliti sendiri

Penelitian yang dilakukan ini merupakan upaya menambah wawasan berpikir ilmiah, terutama dalam rangka pembinaan kemampuan profesional guru secara teoritis dan kaitannya dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan ditemukan berbagai titik kelemahan dan keunggulan program pengembangan tersebut akan mudah mengetahui akar permasalahan dari dimensi itu, dan memberikan solusi bila permasalahan serupa terulang kembali. Akan tetapi melalui penelitian kualitatif ini

penulis merasakan bahwa pengkajiannya lebih rinci dan natural dibanding teknik kuantitatif, karena membutuhkan kegiatan membaca yang lebih banyak.

#### 4. Bagi Penelitian lebih lanjut.

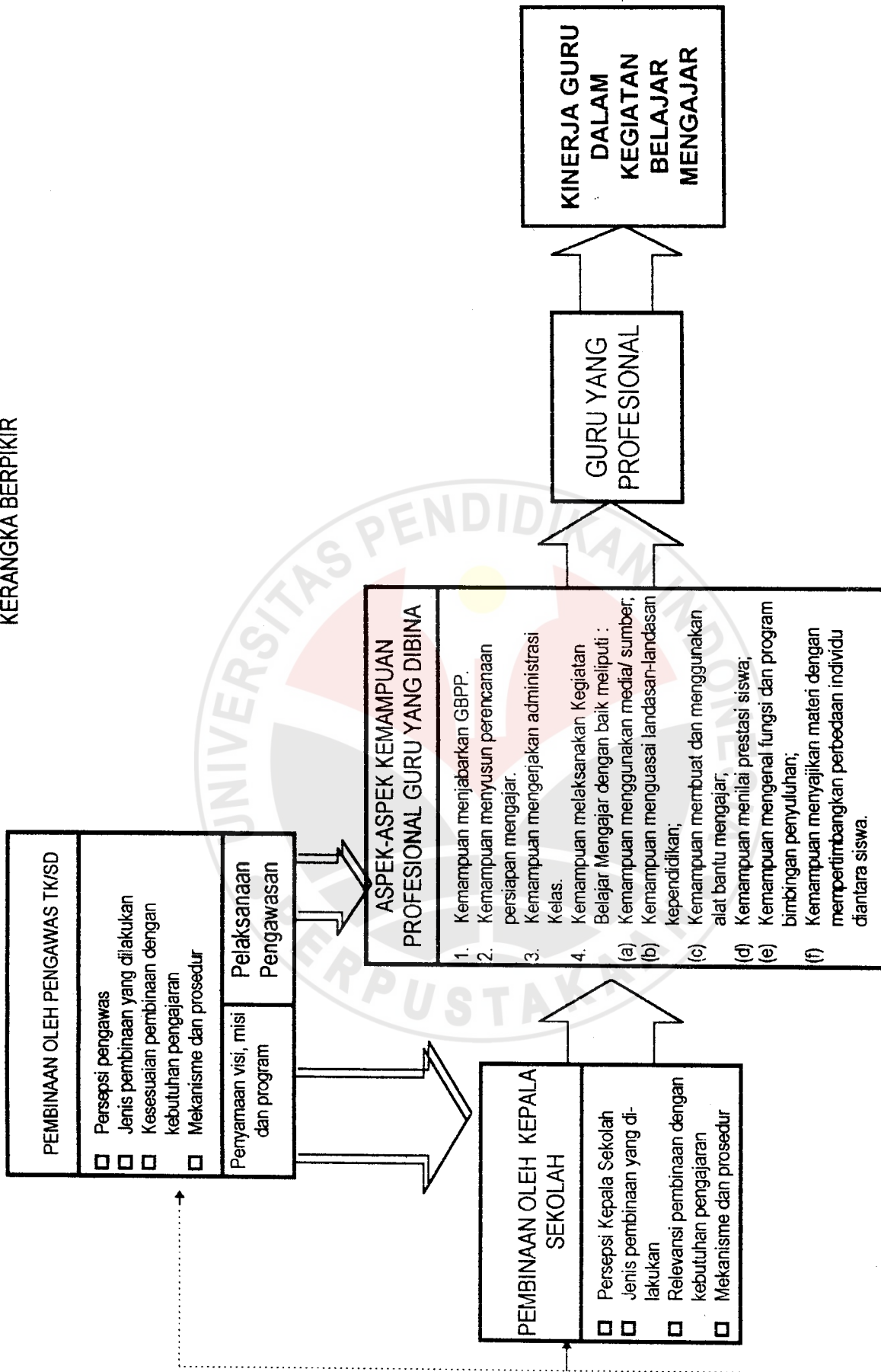
Untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru SD dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan kajian yang relevan. Diharapkan pada penelitian lebih lanjut yang judulnya berkaitan dengan materi ini akan dapat lebih memperdalam kajiannya.

#### D. Kerangka Berpikir

Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun dan berfungsi sebagai lembaga pelayanan untuk membina kemampuan dasar yakni membaca, menulis dan menghitung. Dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan di Sekolah Dasar yang berkualitas ada sejumlah komponen yang secara sistem saling berkaitan antara satu sama lainnya, seperti guru, materi pelajaran, dana pendidikan dan fasilitas pengajaran lainnya.

Komponen guru memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sekolah. Dalam keberadaannya di sekolah, guru memikul berbagai tugas dan tanggung jawab yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan profesional guru diperlukan upaya pembinaan. Pembinaan guru dapat dilakukan melalui atasan langsung yaitu Kepala Sekolah dan Pengawas khusus untuk mengendalikan kegiatannya. Oleh karena itu paradigma yang dijadikan kerangka berpikir bagi penelitian ini, secara visual dapat dilihat ilustrasinya pada gambar berikut ini :

Gambar 1  
KERANGKA BERPIKIR



Paradigma penelitian di atas, berangkat dari konsep fungsi administrasi personil yang diantaranya adalah Development atau pembinaan dan pengembangan.

Pengawas TK/SD adalah tenaga profesional yang telah disiapkan untuk membantu guru yang secara operasional bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fungsi supervisor yang dipunyai oleh Pengawas TK/SD lebih dititikberatkan kepada pembinaan guru dan bukan untuk mencari-cari kesalahan guru.

Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan sekolah mulai dari pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan sampai kepada aspek pembinaan kepada guru-guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang baik sangat tergantung dari bagaimana Kepala Sekolah memenej sekolahnya, termasuk bagaimana Kepala Sekolah membina guru dan memotivasi guru agar menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.

Aspek-aspek yang dibina oleh Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah sama yaitu aspek-aspek profesional guru yang antara lain : kemampuan menjabarkan GBPP, kemampuan menyusun perencanaan persiapan mengajar, kemampuan melaksanakan KBM, kemampuan menggunakan media/sumber, kemampuan menguasai landasan kependidikan, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, kemampuan menilai prestasi siswa, kemampuan mengenal administrasi sekolah dan kemampuan memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.

Kerjasama Pengawas TK/SD dan Kepala Sekolah sangat diharapkan untuk menyamakan visi dan misi dan program pembinaan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan Pengawas TK/ SD dengan Kepala Sekolah yang mempunyai objek binaan yang sama yaitu guru.

Usaha pembinaan ini akan meningkatkan profesional guru sehingga guru betul-betul menjadi guru yang profesional yang pada akhirnya akan mempengaruhi keinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar.





